

ABSTRAK

ARJAN TOFANI RUKMAN ,. Koordinasi Pemerintah Dalam Implementasi Program Makassar ta' Tidak Rantasa di Kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar (dibimbing oleh Drs. H. Ansyari Mone, M.pd dan Rudi Hardi, S.Sos, M.Pd)

Artikel ini membahas tentang Koordinasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makassar ta tidak Rantasa. Permasalahan yang di hadapi saat ini adalah yaitu “bagaimana Koordinasi yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan implementasi kebijakan makassar ta tidak rantasa di kecamatan tamalate kelurahan bongaya Kota Makassar”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini sudah berjalan dengan efektif dan dapat di simpulkan bahwa (1) Koordinasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makassar ta tidak rantasa di kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar sudah berjalan dengan baik dengan meliputi indikator dalam Koordinasi yaitu (a) Komunikasi, pemerintah dalam menjalankan koordinasi Implementasi Makassar ta tidak rantasa menggunakan 2 cara dalam berkomunikasi yaitu secara lisan baikpun tulisan. Secara lisan dengan mengadakan sosialisasi terkait kebijakan MTR dan dengan tulisan yaitu dengan menggunakan media Sosial. (b) Kesepakatan dan Komitmen, pemerintah telah melakukan kesepakatan dan Komitmen dalam menjalankan implementasi Makassar ta tidak rantasa yaitu dengan memmbuat suatu kesepakatan antara Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Dan Kelurahan dalam tangkap tangan bagi masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya dan di berikan sanksi. (c) Kontinuitas Perencanaan. Dalam keberlanjutan implementasi kebijakan ini Pemerintah berencana mengadakan TPS 3R yang dimana memberikan sinegritas bagi masyarakat dan pemerintah di mana masyarakat adalah obyeknya.

Adapun factor-faktor yang mendukung dalam Koordinasi yaitu kesadaran dirisendiri, kedisiplinan dan sanks, dan factor penghambat yaitu keterbalikan dari factor pendukung. Dan apa yang di harap dari penelitian ini dapat membantu pemerintah kedepannya dalam menjalankan kebijakan mengenai masalah persampahan.

Kata Kunci : Koordinasi, Implementasi, Makassar ta Tidak rantasa